

# Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia

Raden Rizal Rukanda\*

\*Penulis korespondensi. Ekonomi Pembangunan, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

---

**JEL Classification Code:**  
G21, I30

**Kata kunci:**  
Inklusi Keuangan, Kemiskinan, Akses, Layanan Keuangan.

**Email penulis:**  
[rukanda.rizal12@gmail.com](mailto:rukanda.rizal12@gmail.com)\*

## ***Abstract***

Financial inclusion is believed to be one way to reduce poverty. Financial inclusion can provide opportunities for poor or marginal social groups in order to improve their lives with the availability and ease to be able to use the formal financial services are affordable and low cost. This study uses the ratio of the number of banking offices per 100 thousand of the adult population, the ratio of the number of credits per the GRDP, and the ratio of the number of third-party funds per GRDP to describe financial inclusion in terms of access and use of financial services. The data used is panel data of 33 provinces annually for the period 2011 to 2019 processed with static panel data regression. The results show that financial inclusion by increasing the use of banking products such as savings, current accounts and time deposits can reduce poverty in Indonesia.

## **Abstrak**

Inklusi keuangan dipercaya dapat menjadi salah satu cara untuk dapat menurunkan kemiskinan. Inklusi keuangan dapat memberikan kesempatan bagi golongan masyarakat miskin atau marginal memperbaiki kehidupannya dengan ketersediaan serta kemudahan untuk dapat menggunakan layanan keuangan formal yang terjangkau dan rendah biaya. Penelitian ini menggunakan rasio jumlah kantor perbankan per 100 ribu penduduk dewasa, rasio jumlah kredit per PDRB, serta rasio jumlah DPK per PDRB untuk menggambarkan inklusi keuangan dari sisi akses dan penggunaan layanan keuangan. Data yang digunakan merupakan data panel 33 Provinsi tahunan

periode 2011 hingga 2019 diolah dengan regresi panel data statis. Hasil menunjukkan bahwa inklusi keuangan dengan meningkatkan penggunaan produk perbankan seperti

tabungan, giro dan deposito dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia.

---

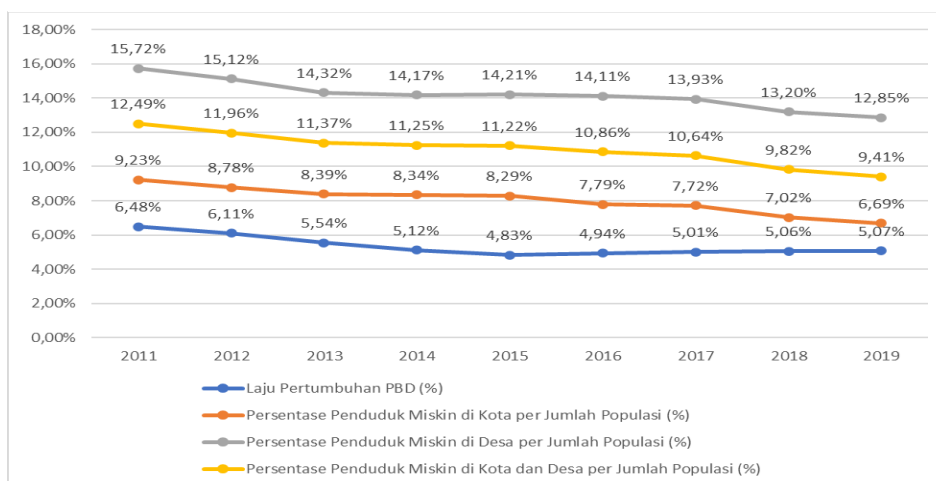
## **Pendahuluan**

Melanjutkan salah satu tujuan dari *Millenium Development Goal* yaitu menurunkan setengah jumlah penduduk miskin di dunia, *Sustainable Development Goal* menargetkan tidak adanya kemiskinan pada tahun 2030 di dunia. Menurut United Nations (UN), pada tahun 2010 sekitar 15,7% dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menurun menjadi sekitar 10% di tahun 2015 namun laju penurunan tersebut mengalami perlambatan, pada tahun 2019 sekitar 8,2% penduduk dunia masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,90 USD. Pemberantasan kemiskinan memerlukan kebijakan visioner untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Inklusi keuangan telah dianggap sebagai alat dinamis untuk mencapai stabilitas makroekonomi multidimensi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan pendapatan untuk negara maju dan berkembang (Omar & Inaba, 2020).

Inklusi keuangan adalah konsep multidimensi dari pembangunan keuangan. Menurut Iqbal *et al.* (2020) akses dan penggunaan dari layanan perbankan merupakan dimensi utama dari inklusi keuangan. Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai tersedianya akses ke produk dan layanan keuangan bagi individu maupun pelaku usaha yang berguna dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Data terakhir dari Global Findex pada tahun 2017, terdapat sekitar 1,7 milyar orang dewasa di dunia tidak memiliki rekening di layanan keuangan dan 1,2 miliar orang dewasa telah memperoleh akun sejak 2011 serta 515 juta orang dewasa sejak 2014. Antara 2014 dan 2017, persentase orang dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan atau melalui layanan uang seluler meningkat secara global dari 62 persen menjadi 69 persen. Di negara berkembang, pangsanya naik dari 54 persen menjadi 63 persen. Tersedianya akses ke produk dan layanan keuangan dapat membantu mereka untuk memulai dan memperluas bisnis, berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, mengelola risiko, dan mengatasi guncangan keuangan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Di Indonesia kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah menargetkan bahwa pada akhir tahun 2024 kemiskinan menjadi 7% hingga 6,5%. Pada tahun 2011 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Persentase penduduk miskin juga terus mengalami penurunan tiap tahunnya (Grafik 1.). Terlihat jelas pada tahun 2012 hingga 2017 ketika adanya perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat penurunan kemiskinan juga ikut mengalami perlambatan. Hal ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Selain itu, menurut Bank Dunia pada tahun 2017 hanya 49% dari penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akun di institusi formal. Dalam Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 hanya sekitar 38,03% penduduk dewasa yang dikategorikan *well literate* atau melek keuangan.

**Grafik 1.** Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Kemiskinan di Indonesia (2011-2019)



Sumber: Badan Pusat Statistika (diolah)

Menurut data dari Badan Pusat Statistika per Maret 2019 tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,1 juta jiwa, Jawa Tengah sebesar 3,75 juta jiwa, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 3,4 juta jiwa. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin terbesar berada pada kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat 27,53%; Papua 22,17%; NTT 21,09%; Maluku 17,69%; dan Gorontalo 15,52%. Grafik 2. menunjukkan persentase kemiskinan dan indeks inklusi keuangan di provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dengan urutan provinsi yang memiliki persentase kemiskinan terendah hingga tertinggi. Indeks inklusi keuangan memiliki pola berfluktuatif namun memiliki tren negatif. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi yaitu sebesar 94,76% dan memiliki persentase kemiskinan terendah yaitu 3,47% sedangkan provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan terendah sebesar 59,84% dan persentase kemiskinan tertinggi yaitu 27,53%.

Demirgüç-Kunt *et al.* (2008) mengatakan bahwa sektor keuangan merupakan induk dari proses pembangunan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor keuangan karena dapat menyediakan layanan keuangan dasar yang bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Namun, tidak seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dalam pembangunan sektor keuangan. Untuk menjawab masalah tersebut sistem keuangan yang inklusif sangat diperlukan. Sistem keuangan yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang aman dan efisien bagi kegiatan dalam sektor keuangan.

Penelitian mengenai keterkaitan dari inklusi keuangan terhadap kemiskinan masih terbilang sedikit dengan hasil yang beragam. Park dan Mercado (2016) melakukan penelitian mengenai inklusi keuangan dan kemiskinan di 177 negara dan 37 negara di antaranya merupakan negara berkembang di Asia. Mereka menemukan bahwa inklusi keuangan dapat menurunkan kemiskinan. Dawood *et al.* (2019) dalam penelitiannya menggunakan metode *binary logistic* menemukan bahwa di Indonesia inklusi keuangan dapat menurunkan kemungkinan rumah tangga untuk mengalami kemiskinan absolut.

Inoue (2019) Meneliti hubungan antara kemiskinan dengan inklusi keuangan dan pendalaman keuangan dari bank sektor publik dan bank swasta di India. Ia menemukan bahwa pendalaman keuangan dan inklusi keuangan saling bersinergi dalam menurunkan kemiskinan di India. Berbeda dengan Honohan (2008) yang menemukan bahwa terdapat korelasi negatif antara akses keuangan dengan kemiskinan, namun hal ini hanya berlaku jika hanya akses keuangan saja yang menjadi *regressor* tunggal. Selain itu juga Honohan (2008) menyimpulkan jika pembangunan keuangan dapat menurunkan kemiskinan namun hal tersebut dikarenakan pendalaman keuangan dan bukan karena akses ke keuangan. Pendalaman keuangan didefinisikan sebagai peningkatan rasio aset keuangan suatu negara terhadap produk domestik brutonya sedangkan akses keuangan bukan mengenai seberapa besar aset yang dimiliki tetapi seberapa mudah masyarakat untuk

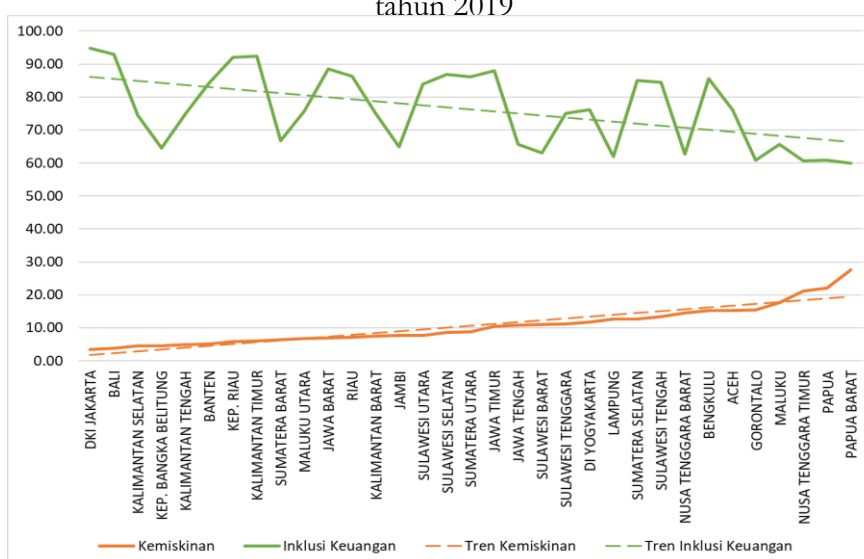
mendapatkan layanan keuangan. Neaime dan Gaysset (2018) yang menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan stabilitas keuangan di negara *Middle East and North Africa* (MENA) tidak menemukan adanya pengaruh inklusi keuangan terhadap penurunan kemiskinan. Begitu pula dengan Mader (2018) yang menentang pandangan inklusi keuangan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan karena kurangnya bukti empiris yang meyakinkan.

Menghilangkan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir juga berdampak pada melambatnya penurunan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya membangun pertumbuhan yang inklusif dengan dukungan inklusi keuangan. Keuangan yang inklusif dinilai oleh para pembuat kebijakan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya dinikmati bagi individu, tetapi juga untuk menjalankan roda perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DKI Jakarta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi dan memiliki persentase penduduk miskin terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain sebaliknya provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan terendah namun memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Meskipun pada provinsi lain tidak terlihat jelas bahwa indeks inklusi keuangan yang tinggi menandakan persentase kemiskinan yang rendah namun ketika persentase kemiskinan di provinsi di Indonesia diurut berdasarkan terendah hingga tertinggi indeks inklusi keuangan memiliki tren yang negatif. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dampak dari berbagai indikator inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2019. Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan dimensi akses dan penggunaan dari perbankan yang merupakan dimensi utama dari indeks inklusi keuangan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan nilai indeks inklusi keuangan sebagai indikator untuk menggambarkan inklusi keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat keunikan dari berbagai elemen pembentuk inklusi keuangan. Dimensi akses digambarkan melalui rasio jumlah kantor perbankan per 100.000 orang dewasa sedangkan dimensi penggunaan digambarkan melalui dua indikator yaitu rasio jumlah kredit per PDRB serta rasio jumlah DPK per PDRB. Terakhir untuk menggambarkan kemiskinan penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional. Di Indonesia, penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran penduduk tidak dapat memenuhi harga kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

**Grafik 2.** Indeks Inklusi Keuangan dan Persentase Kemiskinan di Provinsi di Indonesia pada tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistika; Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Definisi Inklusi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia inklusi keuangan merupakan segala upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014, hlm. 4). Ada beberapa faktor yang menghambat masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan, dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan karena kurang tersedianya kantor layanan keuangan, memiliki prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku.

Pembangunan yang inklusif merupakan salah satu strategi dasar yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Menurut Ali & Son (2007) pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin akses yang sama terhadap peluang yang diciptakan untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Menurut Bank Dunia, sejauh mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan bergantung pada seberapa inklusif sistem keuangan tersebut. Artinya, efek pertumbuhan dari pembangunan keuangan menjadi *pro-poor* ketika sistem keuangan inklusif memberi masyarakat yang lebih miskin akses ke berbagai layanan keuangan berkualitas.

Perbankan sebagai lembaga keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya. Akses ke layanan perbankan akan mendorong masyarakat yang sementara kelebihan dana untuk menggunakan produk dari layanan keuangan seperti asuransi, deposito, serta tabungan. Sementara itu bagi masyarakat yang sementara kekurangan dana dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman di bank dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan non formal. Adanya sistem keuangan yang efisien dan inklusif dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

## **Landasan Teori dan Tinjauan Literatur**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep dasar untuk memahami inklusi keuangan serta kemiskinan. Adapun teori maupun konsep dasar yang digunakan terdiri dari (1) Peran Sektor Keuangan dalam Pertumbuhan Ekonomi; dan (2) Inklusi Keuangan.

### **Peran Sektor Keuangan dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses terjadinya kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB) baik di tingkat nasional maupun regional (Produk Domestik Regional Bruto). PDB adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam periode waktu tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Namun, menurut Ali dan Son (2007) pertumbuhan ekonomi tidak menjamin bahwa seluruh orang akan mendapatkan manfaat yang sama. Todaro & Smith (2014) juga mengatakan bahwa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat miskin. Adanya pertumbuhan dapat melewatkan masyarakat miskin sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan yang akan berujung pada melambatnya penurunan kemiskinan akibat adanya pertumbuhan dan dapat mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Ali & Son (2007) menambahkan bahwa perlu adanya pertumbuhan yang inklusif di mana pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin akses yang sama terhadap peluang yang diciptakan untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Teori pertumbuhan milik Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2014). Meningkatnya investasi akan meningkatkan produktivitas dalam memproduksi barang dan jasa serta meningkatkan pendapatan sehingga perekonomian dapat bertumbuh. Oleh karena itu, dalam pandangan ini peningkatan akumulasi modal diperlukan untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Sektor keuangan terdiri dari dua lembaga keuangan yaitu perbankan (bank-bank umum) dan lembaga keuangan non-bank (pasar modal, lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi, dan dana pensiun). Sektor keuangan merupakan sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu jalur akumulasi modal (modal fisik dan manusia) serta jalur teknologi. Teori yang dikembangkan oleh Robert Solow menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi (modal dan tenaga kerja) dan kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2014). Peran dari sektor keuangan yaitu sebagai lembaga intermediasi yang mampu menghimpun dana dari pihak yang sementara kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkannya ke pihak yang sementara kekurangan dana (*deficit unit*). Sektor keuangan dapat mengalokasikan aset yang tidak produktif menjadi aset produktif melalui berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan berisiko rendah sehingga mampu meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi bila sektor keuangan bekerja dengan baik dalam membiayai sektor riil sehingga peningkatan pembiayaan ke sektor riil akan meningkatkan pembangunan modal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan tidak bisa dipungkiri telah memainkan peranan yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi.

### **Inklusi Keuangan**

Sektor keuangan yang merupakan lembaga intermediasi bertindak sebagai penggerak dalam perekonomian. Semakin baik sektor keuangan untuk dapat tumbuh akan meningkatkan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan kepada sektor riil. Peningkatan pembiayaan sektor produktif akan menambah pembangunan fisik modal yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia sejauh mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan bergantung pada seberapa inklusif sistem keuangan tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambat masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan, dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan karena kurang tersedianya kantor layanan keuangan, memiliki prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku.

Inklusi keuangan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk dapat memfasilitasi orang-orang yang tidak masuk ke dalam sistem keuangan atau masyarakat yang tidak mendapatkan akses ke layanan keuangan untuk dapat mengakses layanan keuangan dengan kualitas yang baik dan terjangkau biayanya. Leyshon & Thrift (1995), mengatakan bahwa konsep inklusi keuangan ini muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. Eksklusi keuangan didefinisikan sebagai sebuah penghalang bagi beberapa kalangan masyarakat terutama masyarakat miskin dan individu tertentu untuk dapat masuk ke dalam sistem keuangan.

Menurut Sharma (2016) inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya penyediaan akses layanan keuangan atau perbankan formal kepada seluruh lapisan masyarakat. Sethi dan Acharya (2018) menjelaskan bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai suatu proses yang membawa berbagai macam orang ke dalam sistem keuangan, terutama kaum marginal termasuk para migran untuk dapat mengakses layanan keuangan dasar. Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses yang dapat memastikan kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk seluruh pelaku ekonomi.

Berbagai lembaga juga menjabarkan pengertian dari inklusi keuangan. Menurut Bank Indonesia inklusi keuangan merupakan segala upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014, hlm. 4). Mereka menambahkan bahwa inklusi keuangan merupakan strategi nasional dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta

stabilitas ekonomi. Menurut *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*, inklusi keuangan merupakan keadaan di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan biaya yang terjangkau bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi penyedia, dengan hasilnya bahwa pelanggan yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada pilihan informal yang ada. *Financial Action Task Force (FATF)* mengatakan bahwa inklusi keuangan meliputi penyediaan akses ke serangkaian layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi kelompok-kelompok rentan dan kurang beruntung lainnya, termasuk orang berpenghasilan rendah, pedesaan dan tidak berdokumen, yang telah terlayani atau dikecualikan dari sektor keuangan formal. Menurut *Reserve Bank of India (RBI)* inklusi keuangan merupakan proses memastikan akses ke produk dan layanan keuangan yang diperlukan serta dibutuhkan oleh semua bagian masyarakat pada umumnya dan kelompok rentan seperti kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah khususnya, dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan yang diatur berdasarkan regulasi oleh lembaga mayoritas.

## **Penelitian Terdahulu**

Inoue (2019) Meneliti hubungan antara kemiskinan dengan inklusi keuangan dan pendalaman keuangan dari bank sektor publik dan bank swasta. Dengan *unbalanced* panel data di India dan wilayah persatuan. Menggunakan Jumlah kredit bank per PDB nominal sebagai proksi dari pendalaman keuangan serta jumlah cabang bank serta jumlah akun bank sebagai proksi dari inklusi keuangan sebagai variabel dependen dan persentase populasi di bawah garis kemiskinan. Penelitian milik Inoue juga menemukan bahwa peningkatan inklusi dan kedalaman keuangan di bank sektor publik memiliki dampak yang positif untuk menurunkan kemiskinan di India.

Dawood *et al.* (2019) dalam penelitiannya meneliti hubungan inklusi keuangan dan kemiskinan pada level rumah tangga di Indonesia. Menggunakan data primer dari 300.000 rumah tangga pada tahun 2007 dan diolah dengan teknik *Binary Logistic* menemukan bahwa inklusi keuangan secara signifikan menurunkan kemungkinan rumah tangga berada dalam kemiskinan absolut. Lal (2018) juga menemukan bahwa di India inklusi keuangan dapat membantu mengeluarkan penduduk miskin dari kemiskinan dengan adanya akses ke layanan keuangan. Penelitian milik Lal menggunakan 540 data primer yang diambil dari 3 wilayah di India pada periode Juli-Desember 2005 dan diolah menggunakan analisis faktor.

Terdapat juga beberapa penelitian yang tidak menemukan adanya hubungan antara inklusi keuangan dan kemiskinan seperti Neaime & Gaysset (2018) yang menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan stabilitas keuangan di negara *Middle East and North Africa (MENA)*. Mereka menggunakan dimensi akses ke layanan keuangan sebagai proksi dari inklusi keuangan yaitu ATM per 100.000 orang dewasa dan Bank per 100.000 orang dewasa. Namun dalam penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mader (2018) melakukan tinjauan kritis terhadap literatur dan menentang kesimpulan bahwa inklusi keuangan dapat menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Honohan (2008) menemukan bahwa terdapat korelasi negatif antara akses keuangan dengan kemiskinan, namun hal ini hanya berlaku jika hanya akses keuangan saja yang menjadi *regressor* tunggal. Akses keuangan menjadi tidak signifikan setelah pendapatan per kapita sebagai *regressor* kedua. Selain itu juga Honohan (2008) menyimpulkan jika pembangunan keuangan dapat menurunkan kemiskinan namun hal tersebut dikarenakan pendalaman keuangan dan bukan karena akses keuangan.

## **Metode Penelitian**

### **Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data tahunan 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan persentase jumlah masyarakat miskin yang berada di bawah garis kemiskinan nasional sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel rasio jumlah kantor perbankan

per 100.000 orang dewasa untuk mewakili dimensi akses dari inklusi keuangan, serta rasio jumlah kredit per PDRB dan rasio jumlah DPK per PDRB untuk mewakili dimensi penggunaan dari inklusi keuangan sebagai variabel independen. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai indikator hambatan masyarakat mengakses layanan keuangan formal dari sisi penawaran. Serta menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka melek huruf (AMH) sebagai variabel kontrol dan sebagai indikator hambatan masyarakat mengakses layanan keuangan formal dari sisi permintaan. Variabel IPM dan AMH digunakan sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia yang dimiliki tiap daerah. IPM merupakan indeks yang dibangun dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya nilai IPM akan menunjukkan rendahnya produktivitas masyarakat. Produktivitas masyarakat yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima dan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Angka melek huruf mengukur keterampilan masyarakat untuk membaca dengan tingginya angka melek huruf masyarakat. Tingginya keterampilan yang dimiliki masyarakat akan meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi nilai IPM dan AMH diharapkan akan membantu masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan formal sehingga nantinya dapat membantu inklusi keuangan menurunkan angka kemiskinan.

**Tabel 1.** Indikator Variabel dan Sumber Data

No.	Variabel	Indikator	Satuan	Sumber
1.	Kemiskinan	Persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional	Persen	Badan Pusat Statistika
2.	Akses ke Layanan Perbankan	Rasio jumlah kantor perbankan per 100.000 orang dewasa	-	Otoritas Jasa Keuangan
3.	Penggunaan Layanan Perbankan	Rasio jumlah kredit per PDRB	-	Otoritas Jasa Keuangan
		Rasio jumlah DPK per PDRB	-	Otoritas Jasa Keuangan
4.	Variabel kontrol	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Badan Pusat Statistika
		Angka Melek Huruf	Persen	Badan Pusat Statistika

### **Pengembangan Model**

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Neaime & Gaysset (2018) yang meneliti mengenai pengaruh dari akses ke layanan perbankan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menambahkan sudut pandang lain mengenai inklusi keuangan. Pada penelitian ini tidak hanya dari sisi akses ke layanan perbankan namun juga dari sisi penggunaan layanan perbankan yaitu tabungan dan kredit yang diwakili oleh variabel rasio jumlah kredit per PDRB (CRP) serta rasio jumlah DPK per PDRB (DPKP). Selain itu model di bawah memasukkan IPM dan AMH untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang menggunakan layanan keuangan formal. Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 KCP_{it} + \beta_2 CRP_{it} + \beta_3 DPKP_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \beta_6 AMH_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan :

$POV_{it}$  : Persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional provinsi i pada periode t

$KCP_{it}$  : Rasio jumlah kantor perbankan per 100.000 orang dewasa provinsi i pada periode t

$CRP_{it}$  : Rasio total kredit per PDRB provinsi i pada periode t

$DPKP_{it}$ : Rasio total DPK per PDRB provinsi i pada periode t

$IPM_{it}$  : Indeks Pembangunan Manusia provinsi i pada periode t

$AMH_{it}$  : Angka Melek Huruf provinsi i pada periode t



$\varepsilon_{it}$  : Error term

Dalam mencapai tujuan penelitian, teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel data statis. Keunggulan dari teknik estimasi data panel ini adalah dapat menunjukkan heterogenitas setiap individu dan mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan data *time-series* maupun *cross-section* (Baltagi, 2005). Dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, terdapat tiga alternatif model yang dapat digunakan yaitu berdasarkan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Stasioneritas

Sebelum menentukan model regresi data panel, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian stasioneritas atau *unit root test* pada seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini. Pengujian ini dilakukan untuk menghindari *spurious regression*. *Spurious regression* merupakan model regresi yang tidak mengungkapkan hubungan yang sebenarnya atau ketika variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan namun pada kenyataannya hubungan tersebut ada karena kedua variabel tersebut memiliki tren yang sama. Pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Variabel memiliki *unit root*

$H_1$  : Variabel tidak memiliki *unit root*

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah:

Probabilitas  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Probabilitas  $> \alpha$ , maka  $H_0$  tidak ditolak

**Tabel 2.** Hasil Unit Root Test Levin, Lin, & Chu

Variabel	Prob. (Level)
POV	0,0000
CRP	0,0000
DPKP	0,0000
KCP	0,0000
IPM	0,0000
AMH	0,0000

Tabel 2 menunjukkan hasil uji Levin, Lim & Chu untuk melihat stasioneritas variabel yang digunakan. Hasil di atas menunjukkan semua variabel yang digunakan memiliki probabilitas 0,0000. Hal ini berarti nilai probabilitas tidak lebih besar dari *alpha* sebesar 5 persen, sehingga  $H_0$  ditolak. Oleh karena seluruh variabel telah stasioner pada level maka dapat digunakan dalam penelitian.

### Penentuan Model Regresi Data Panel

#### a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat digunakan antara CEM (*Common Effect Model*) dan FEM (*Fixed Effect Model*). Pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : CEM lebih baik

$H_1$  : CEM tidak lebih baik

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah:

Probabilitas uji Chow  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Probabilitas uji Chow  $> \alpha$ , maka  $H_0$  tidak ditolak

**Tabel 3.** Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob.
Cross-Section Chi-Square	0,0000

Tabel 3 menunjukkan hasil uji Chow untuk menentukan model estimasi yang digunakan antara CEM dan FEM. Hasil di atas menunjukkan nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tidak lebih besar dari *alpha* sebesar 5 persen, sehingga  $H_0$  ditolak atau CEM tidak lebih baik dibandingkan model FEM.

b. uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan manakah model estimasi yang lebih tepat digunakan antara FEM (*Fixed Effect Model*) dan REM (*Random Effect Model*). Pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : REM lebih baik

$H_1$  : REM tidak lebih baik

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah:

Probabilitas uji Hausman  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Probabilitas uji Hausman  $> \alpha$ , maka  $H_0$  tidak ditolak

**Tabel 4.** Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	Prob.
<i>Cross-Section random</i>	0,3836

Tabel 4 menunjukkan hasil uji Hausman untuk menentukan model estimasi yang lebih baik digunakan antara REM dan FEM. Hasil menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,3836. Nilai probabilitas lebih besar dari *alpha* sebesar 5 persen, sehingga  $H_0$  tidak ditolak atau REM lebih baik jika dibandingkan model FEM.

c. uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji LM dilakukan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat digunakan antara CEM (*Common Effect Model*) dan REM (*Random Effect Model*). Pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : CEM lebih baik

$H_1$  : CEM tidak lebih baik

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah:

Probabilitas uji LM  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Probabilitas uji LM  $> \alpha$ , maka  $H_0$  tidak ditolak

**Tabel 5.** Hasil Uji Langrange Multiplier

<i>Cross-section</i>	Prob.
<i>Breusch-Pagan</i>	0,0000

Tabel 5 menunjukkan hasil uji LM untuk menentukan model estimasi yang lebih baik digunakan antara CEM dan REM. Hasil menunjukkan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000. Hal ini berarti nilai probabilitas tidak lebih besar dari *alpha* sebesar 5 persen, sehingga  $H_0$  ditolak atau CEM tidak lebih baik jika dibandingkan model REM. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

**Hasil Estimasi**

Setelah menentukan model regresi yang digunakan, selanjutnya adalah melakukan regresi menggunakan model yang terpilih yaitu REM (*Random Effect Model*). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak dari inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu, persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional (POV). Variabel independennya adalah rasio jumlah kantor perbankan per 100.000 orang dewasa (KCP), rasio jumlah kredit per PDRB (CRP), dan rasio jumlah DPK per PDRB (DPKP). Selain itu penelitian ini menggunakan variabel kontrol Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Angka Melek Huruf (AMH). Berikut merupakan hasil estimasi REM:

**Tabel 6.** Hasil Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Prob.
<i>C</i>	63,3399	0,0000
<i>KCP</i>	0,00059	0,0699
<i>DPKP</i>	-0,08423	0,0000
<i>CRP</i>	0,10277	0,0000
<i>IPM</i>	-0,51835	0,0000
<i>AMH</i>	-0,18172	0,0001
<i>R-Squared</i>		0,60014

### Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa *R-squared* memiliki nilai sebesar 0,60014. Nilai tersebut menunjukkan seberapa kuat model regresi dapat menjelaskan kontribusi pengaruh variabel independen CRP, DPKP, KCP, IPM, dan AMH terhadap variabel dependen *POV*. Berdasarkan nilai *R-squared* tersebut dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan yang digambarkan melalui KCP (rasio jumlah kantor cabang bank per 100.000 orang dewasa), CRP (rasio jumlah kredit per PDRB), DPKP (rasio jumlah DPK per PDRB), IPM (indeks pembangunan manusia), dan AMH (angka melek huruf) secara simultan berpengaruh sebesar 60% terhadap kemiskinan yang digambarkan oleh persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional (*POV*).

Tabel 6 menunjukkan hasil estimasi pengaruh variabel independen CRP, DPKP, KCP, IPM, dan AMH terhadap dependen *POV*. Berdasarkan hasil estimasi REM, koefisien DPKP menunjukkan hasil negatif dan signifikan pada  $\alpha=5$  persen, sedangkan CRP menunjukkan hasil positif dan signifikan pada  $\alpha=5$  persen. Variabel CRP dan DPKP dalam penelitian ini menggambarkan inklusi keuangan dari dimensi penggunaan. Ketika CRP naik sebesar satu satuan, maka *POV* akan naik sebesar 0,10277 satuan persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya inklusi keuangan yang digambarkan oleh peningkatan rasio jumlah kredit per PDRB akan meningkatkan kemiskinan yang digambarkan oleh persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional. Ketika DPK naik sebesar satu satuan, maka *POV* akan turun sebesar 0,08423 satuan persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Artinya semakin meningkat inklusi keuangan yang digambarkan oleh peningkatan rasio jumlah DPK per PDRB akan menurunkan kemiskinan dengan kata lain penggunaan layanan keuangan tabungan dapat menurunkan kemiskinan.

Variabel terakhir yang menggambarkan inklusi keuangan dari dimensi akses yaitu KCP. Tabel 6 menunjukkan bahwa probabilitas variabel KCP bernilai 0,0699 lebih besar dari  $\alpha=5$  persen yang artinya rasio jumlah kantor perbankan per 100,000 orang dewasa tidak mempengaruhi variabel *POV* yang menggambarkan persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki koefisien yang bernilai negatif dan signifikan pada  $\alpha=5$  persen. Ketika IPM naik sebesar satu satuan, maka *POV* akan turun sebesar 0,51835 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada indeks pembangunan manusia dapat menurunkan kemiskinan. Koefisien variabel kontrol lain yaitu angka melek huruf (AMH) menunjukkan hasil negatif dan signifikan pada  $\alpha=5$  persen. Ketika AMH naik sebesar satu satuan, maka *POV* akan turun sebesar 0,18172 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan angka melek huruf dapat menurunkan kemiskinan. Kedua variabel yang signifikan menunjukkan bahwa adanya perubahan variabel dependen yaitu *POV* yang disebabkan oleh variabel independen KCP, CRP, dan DPKP sudah mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia yang digambarkan melalui variabel IPM dan AMH.

Dari hasil estimasi ditemukan bahwa koefisien variabel DPKP (rasio jumlah DPK per PDRB) negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan maka semakin tinggi pula masyarakat yang mengakses layanan atau jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan. Semakin mudah masyarakat dapat mengakses layanan tabungan perbankan, maka akan memungkinkan mereka meningkatkan kekayaan melalui pendapatan pasif. Mengingat bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun merupakan tabungan yang bersumber dari pendapatan masyarakat

yang disisihkan dan nantinya akan mendapatkan keuntungan atau bunga. Dengan semakin bertambahnya masyarakat yang memiliki kebiasaan menabung maka akan dapat meningkatkan kemungkinan keluarnya masyarakat tersebut dari bawah garis kemiskinan. Selain itu, semakin tinggi tabungan maka akan menurunkan jumlah uang beredar dan menurunkan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat yang menurun akan menurunkan harga barang pokok makanan dan non-makanan. Menurunnya harga barang pokok membuat batas garis kemiskinan nasional menurun bila diasumsikan pengeluaran masyarakat tetap dan garis batas kemiskinan menurun, maka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Kiendrebeogo & Minea (2016) yang menemukan bahwa adanya akses yang lebih baik ke layanan tabungan dapat dengan tegas menurunkan kemiskinan di CFA Franc.

Pada tabel 6 juga disimpulkan bahwa inklusi keuangan yang digambarkan melalui variabel KCP (rasio jumlah kantor cabang bank per 100.000 orang dewasa) tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh inklusi keuangan dalam hal akses ke layanan perbankan tidak menimbulkan pengaruh terhadap kemiskinan karena struktur perbankan di Indonesia belum cukup berkembang secara efektif untuk menurunkan kemiskinan.

Selanjutnya pada tabel 6 dapat dilihat bahwa koefisien CRP (rasio jumlah kredit per PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional (POV). Semakin tinggi penggunaan layanan kredit perbankan akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya layanan kredit akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, bila layanan kredit tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin maka kredit hanya akan meningkatkan pendapatan penduduk kaya dan meninggalkan mereka yang lebih rendah pendapatannya. Selain hal tersebut pengaruh positif kenaikan kredit terhadap kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya hubungan non-linear antara kredit dan kemiskinan. Menurut Kiendrebeogo dan Minea (2016), pada negara-negara dengan sistem keuangan yang belum berkembang, bank mungkin tidak memiliki prosedur yang efektif untuk mengevaluasi aplikasi kredit, tidak memiliki keahlian untuk memantau kinerja peminjam, atau menderita karena cakupan cabang bank yang tidak memadai, yang menghalangi akses masyarakat miskin ke sistem keuangan formal. Oleh karena itu, meskipun adanya akses yang lebih baik ke tabungan dapat menurunkan kemiskinan namun perkembangan akses ke kredit harus mencapai ambang tertentu untuk dapat menurunkan kemiskinan (Kiendrebeogo & Minea, 2016).

## **Kesimpulan dan Implikasi**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2019. Pada penelitian ini inklusi keuangan digambarkan melalui tiga variabel yaitu rasio jumlah kantor perbankan per 100 ribu penduduk dewasa yang melihat inklusi keuangan dari sisi akses ke layanan keuangan, serta rasio jumlah kredit dan rasio jumlah DPK per PDRB yang melihat inklusi keuangan dari sisi penggunaan layanan keuangan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menjelaskan sisi penawaran dari layanan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa akses ke layanan keuangan yang digambarkan melalui rasio jumlah kantor perbankan per 100 ribu penduduk dewasa tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia.

Inklusi keuangan yang dilihat dari sisi penggunaan hanya variabel rasio jumlah DPK per PDRB yang memiliki pengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. Semakin banyak simpanan masyarakat di sektor perbankan maka konsumsi masyarakat akan menurun. Mengingat bahwa salah satu faktor terjadinya kenaikan harga adalah karena meningkatnya konsumsi masyarakat. Kenaikan harga terutama harga kebutuhan pokok berupa makanan dan non-makanan tersebut dapat membuat semakin banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kemiskinan meningkat. Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa variabel rasio jumlah kredit per PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan. Implikasinya adalah kemiskinan dapat menurun karena adanya peningkatan alokasi pendapatan masyarakat ke tabungan atau peningkatan penggunaan layanan tabungan oleh masyarakat yang dapat menurunkan harga kebutuhan pokok sehingga semakin banyak masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar baik makanan dan non makanan.

Mengingat masih terdapat kekurangan pada penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang dapat menggambarkan inklusi keuangan. Hal ini disebabkan inklusi keuangan merupakan konsep yang dibentuk dari berbagai dimensi tidak hanya dari akses dan penggunaan layanan keuangan.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11–31.
- Baltagi, B. H. (2005). The One-Way Error Component Regression Model. Dalam *Econometric Analysis of Panel Data* (hlm. 1–19). Chichester: John Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Dawood, T. C., Pratama, H., Masbar, R., & Effendi, R. (2019). Does financial inclusion alleviate household poverty? Empirical evidence from Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 235–252.
- Demirguc-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2008). Access to Finance and Development: Theory and Measurement. Dalam *Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding Access* (hlm. 21–51). Washington DC: World Bank.
- Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking and Finance*, 32(11), 2493–2500.
- Inoue, T. (2019). Financial inclusion and poverty reduction in India. *Journal of Financial Economic Policy*, 11(1), 21–33.
- Iqbal, K., Roy, P. K., & Alam, S. (2020). The impact of banking services on poverty: Evidence from sub-district level for Bangladesh. *Journal of Asian Economics*, 66, 101154.
- Kiendrebeogo, Y., & Minea, A. (2016). Financial development and poverty: evidence from the CFA Franc Zone. *Applied Economics*, 48(56), 5421–5436.
- Lal, T. (2018). Impact of financial inclusion on poverty alleviation through cooperative banks. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 807–827.
- Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 20(3), 312–341.
- Mader, P. (2018). Contesting Financial Inclusion. *Development and Change*, 49(2), 461–483.
- Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*, 24, 199–220.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 37.
- Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2016). Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Asia? Dalam *ADB Economics Working Paper Series* (No. 426).
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion: Conceptual Issues. Dalam *ICRIER Working Paper* (No. 215).
- Sethi, D., & Acharya, D. (2018). Financial inclusion and economic growth linkage: some cross country evidence. *Journal of Financial Economic Policy*, 10(3), 369–385.
- Sharma, D. (2016). Nexus between financial inclusion and economic growth: Evidence from the emerging Indian economy. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13–36.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Classic Theories of Economic Growth and Development. Dalam *Economic Development* (hlm. 118–142). Pearson Addison Wesley.